

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI
KECAMATAN TEBINGTINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2023**

Oleh : Nurul Kholisa

Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study was motivated by a government policy regarding a program called the Waste Bank. This study was conducted in Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency, Number 2 of 2020 concerning Waste Management. The formulation in this study is how the government plays a role in managing the Waste Bank, which is one of the alternatives for waste management in Indonesia. The research used by the author is field research. This study uses the theory of the Role of Government by Ryaas Rasyid (2010), which includes 1) the role of government as a regulator, 2) the role of government as a dynamizer, 3) the role of government as a facilitator, and 4) the role of government as a catalyst. This study uses a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used by the author are interviews, documentation, and literature study. In this study, the data analysis technique used is qualitative, based on the data obtained. The data collection techniques are conducted through interviews and document searches. Meanwhile, the data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification.

The results of this study found that the Meranti Islands Regency Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning waste management is an amendment to Meranti Islands Regency Regional Regulation No. 8 of 2018, The implementation of Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning waste management in Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency, in 2023 shows that the local government has carried out these four roles, although there are still various obstacles in its implementation. As a regulator, the government has issued a decree on the establishment of a waste bank, but it has not been accompanied by clear guidelines, technical guidelines, and SOPs. As a facilitator, the government provides infrastructure, but not comprehensively, especially in the procurement of the main equipment, namely shredders. As a dynamizer, socialization and recycling competitions are held, but they are not yet carried out regularly and comprehensively. As a catalyst, the government strives to build collaboration with the community and educational institutions, although cross-sector partnerships are not yet optimal.

Keywords: Role of Government, Waste Bank, Regulation, Community Participation

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan sampah menjadi tantangan yang serius dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama di Kecamatan Tebing Tinggi yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Volume sampah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat yang belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang efektif. Pemerintah daerah berupaya mengatasi hal tersebut dengan membentuk program bank sampah sebagai solusi berbasis partisipasi masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Tebing Tinggi dengan menggunakan teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid (2010), yang mencakup peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator.

Urusan pemerintahan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh negara dan dijalankan oleh presiden, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh kementerian serta pemerintah daerah. Tugas utama dari pelaksanaan urusan ini adalah untuk melindungi masyarakat, memberikan pelayanan publik, memberdayakan warga, serta meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah berarti bahwa daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemerintahannya

sendiri serta kepentingan penduduk setempat.

Dalam kondisi tertentu, dapat diasumsikan bahwa persoalan lingkungan muncul sebagai konsekuensi dari pembangunan itu sendiri, mengingat perubahan merupakan bagian penting dari proses pembangunan. Namun, bila dilihat secara menyeluruh, pembangunan tidak bisa dipisahkan dari pengaruh berbagai faktor lainnya.

Indikator keberhasilan pembangunan seperti perluasan ekonomi, pertambahan penduduk, dan kemajuan teknologi berpotensi berdampak buruk terhadap lingkungan. Misalnya, lonjakan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat, yang berujung pada bertambahnya volume sampah, baik dari kegiatan konsumsi maupun aktivitas lainnya.

Dalam Peraturan Daerah No 2 tahun 2020 Pasal 1 ayat (5) tersebut mengatakan bahwasannya Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Dinas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di daerah.

Tabel 1.1. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Tahun 2023

NO	Jenis Sampah	Jumlah
1.	Sisa Makanan	63%
2.	Kayu/Ranting/Daun	5%
3.	Plastik	14,6%
4.	Kertas Karton	11,4%
5.	Kaca	2%
6.	Lainnya	4%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa jenis sampah yang paling

hari bisa menghasilkan lebih kurang 45 kubik.



Gambar 1.2 DLH Optimalkan Bank Sampah di Meranti

Sumber: www.riautime.com

Sampah masih menjadi masalah yang belum terpecahkan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Meranti mengatakan keberadaan bank sampah terus dioptimalkan, karena dinilai efektif mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Yang mana Khusus di Tebing Tinggi, saat ini sudah terbentuk dua bank sampah :

dominan dihasilkan adalah sampah organik dan anorganik berupa plastik. Komposisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat masih menghasilkan volume sampah rumah tangga yang tinggi, terutama dari aktivitas domestik sehari-hari. Hal ini menjadi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan, khususnya apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang baik dan partisipatif dari masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah Bank Sampah di Tebingtinggi

No	Bank Sampah	Jumlah
1.	Teluk Belitung	1
2.	Kekas	1
Jumlah		2

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 1.1 Ketua DLH Sebut Sampah Bernilai Ekonomis



Sumber:cakaplah.com,2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Meranti Saiful Bakhri, mengatakan dari beberapa titik tempat pengumpulan sampah seperti pasar sandang pangan, pasar modern dan beberapa tempat lainnya, sampah yang dihasilkan tidak sedikit. Setidaknya, setiap

Berdasarkan table diatas, Bank sampah hanya terdiri dari dua rumah produksi saja, dimana Rumah bank sampah yang satu berada Desa Alai tepatnya di Tebing Tinggi Barat, dan satunya berada Teluk Belitung tepatnya di Kecamatan Merbau.

Peran pemerintah dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kedua kecamatan ini dipilih karena menjadi wilayah yang telah memiliki kegiatan pengelolaan bank sampah yang aktif, dibandingkan

kecamatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bank sampah di Kecamatan Tebing Tinggi merupakan salah satu yang pertama terbentuk dan menjadi percontohan utama bagi wilayah lainnya. Sementara itu, di Kecamatan Merbau, kegiatan pengelolaan bank sampah mulai berkembang melalui inisiatif pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat setempat. Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Fenomena yang telah dipaparkan pada paragraf di atas, maka penulis tertarik untuk menarik rumusan masalah, adapun masalah tersebut, dapat dilihat pada paragraf di bawah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana Peran Pemerintah Dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Fungsi Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator?

1.2.2 Apa saja kendala dan hambatan yang di hadapi pemerintah dalam menjalankan peran tersebut dalam pengelolaan Bank Sampah tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam pengelolaan program Bank Sampah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun 2023, dan faktor apa saja hambatan dalam proses pengelolaan tersebut.

D. TINJAUAN TEORI

A. Teori Ryaas Rasyid 2010

Menurut Ryaas Rasyid dalam (Berlin Desi Fauziah, 2024: 5) Sampah menjadi permasalahan lingkungan hampir disetiap negara termasuk daerah-daerah kecil. Dalam perspektif masyarakat sampah adalah sisa guna benda atau makanan yang tidak bisa di gunakan lagi, dalam hal ini penting bagi Pemerintah untuk menghapus stigma tentang sampah yang berganti bahwa sampah bisa bernilai ekonomis. Maka Pemerintah Daerah harus membuat program yang bernama Bank Sampah. Seperti yang telah di instruksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan keluarnya Peraturan Menti Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan Reude, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah.

Peran pemerintah yang dimaksud ialah Menurut Ryaas Rasyid (2010) adalah sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator
Peran pemerintah sebagai Regulator melibatkan penetapan arahan untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah menyediakan pedoman dasar bagi masyarakat sebagai alat untuk mengatur berbagai aktivitas pemberdayaan.
2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator
Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah mendorong partisipasi masyarakat ketika menghadapi hambatan dalam proses pembangunan untuk menjaga dan meningkatkan dinamika

pembangunan daerah. Dalam perannya ini, pemerintah memberikan bimbingan dan arahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan tersebut sering kali dilakukan melalui tim penyuluh atau lembaga tertentu yang bertugas memberikan pelatihan.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
Peran pemerintah sebagai fasilitator melibatkan penciptaan suasana yang mendukung pelaksanaan pembangunan dengan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, pemerintah terlibat dalam pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dalam bidang pendanaan dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.
4. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator
Katalisator, pemerintah sebagai katalisator berperan sebagai agen yang menunjang percepatan pengembangan potensi yang kemudian dapat menjadi model sosial untuk membangun partisipasi masyarakat.

Pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat atau membantu mereka dalam memenuhi perannya. Peran terbaik pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor. Khususnya ketersediaan sarana dan prasarana, pendanaan, kemitraan, dan partisipasi masyarakat (Suhroh, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan bank sampah di kecamatan tebingtinggi

kabupaten kepulauan Meranti tahun 2023.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Corbin dan Strauss (Utama, 2017) menjelaskan bahwa: “Pendekatan kualitatif merupakan bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data”.

Dalam hal ini peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Dengan demikian, penelitian kualitatif fokus pada penekanan pemahaman tentang masalah – masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistis atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.

Seperti halnya Bogdan dan Taylor, (Dr. Umar Sidiq, 2019) menyebutkan bahwa :“Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik”.

Lebih lanjut Denzin dan Lincoln, (Dr. Umar Sidiq, 2019) menyatakan bahwa :“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen”. Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis

dalam aktivitas penelitian, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Abdussamad, 2021).

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Tebing Tinggi menunjukkan pelaksanaan keempat fungsi pemerintahan menurut teori Ryaas Rasyid (2010), namun belum berjalan optimal.

a. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan bank sampah di bawah koordinasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup. Namun, belum ada juknis, juklak, maupun SOP yang mengatur tata cara operasional secara spesifik. Hal ini berdampak pada belum seragamnya mekanisme pengelolaan bank sampah antarwilayah.

b. Peran Pemerintah sebagai Dinamisor

Pemerintah daerah berupaya mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, lomba kebersihan, dan pelatihan daur ulang sampah. Meskipun demikian, kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan masih bergantung pada momen tertentu. Kendala utama terdapat pada sulitnya mengumpulkan masyarakat serta keterbatasan dana pelatihan.

c. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah telah menyediakan sarana dasar seperti timbangan dan wadah pemilahan sampah, tetapi belum memiliki mesin pencacah dan tempat pengolahan yang memadai. Pengangkutan sampah ke bank sampah juga masih dilakukan secara manual. Kurangnya fasilitas ini membuat proses pengelolaan berjalan lambat

d. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Pemerintah berupaya membangun kemitraan dengan sekolah, lembaga swasta, dan komunitas lingkungan dalam mengembangkan program bank sampah. Namun, kolaborasi masih bersifat sporadis dan belum menjadi sistem yang terintegrasi secara formal. Kurangnya insentif juga menghambat motivasi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah.

2. Kendala dan Hambatan yang di hadapi Pemerintah dalam menjalankan Peran tersebut dalam Pengelolaan Bank Sampah

Dalam upaya mengelola bank sampah secara optimal, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Lingkungan Hidup menghadapi sejumlah kendala dan hambatan. Hambatan ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan peran sebagai regulator, fasilitator, dinamisor, maupun katalisator dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Tebing Tinggi.

Meskipun pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup, telah menunjukkan berbagai upaya dalam menjalankan peran sebagai regulator, dinamisor, fasilitator, dan katalisator dalam pengelolaan bank sampah di

Kecamatan Tebing Tinggi, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari keterbatasan internal pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan masyarakat, belum tersedianya regulasi teknis yang lengkap, serta lemahnya koordinasi antarpihak yang seharusnya terlibat secara aktif dalam mendukung sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri yang berpotensi menghambat efektivitas dan kesinambungan program bank sampah yang telah dibentuk. Jika tidak diantisipasi dan diatasi secara sistematis, berbagai hambatan ini dikhawatirkan dapat mengurangi motivasi masyarakat, memperlemah kelembagaan bank sampah, dan menyebabkan ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami secara rinci kendala-kendala yang dihadapi agar dapat dirumuskan solusi yang tepat sebagai bahan perbaikan ke depan.

Beberapa kendala yang ditemukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan antara lain sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Salah satu kendala utama adalah minimnya sarana dan prasarana penunjang. Hingga saat ini, sebagian besar bank sampah masih melakukan pemilahan sampah secara manual karena belum tersedianya mesin pencacah dan mesin press. Tempat penyimpanan juga belum memadai, dan perlengkapan pelindung diri bagi pengelola tidak disediakan secara khusus.

b. Belum Tersusunnya SOP dan Juknis yang Jelas

Dalam hal regulasi teknis, pemerintah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) atau petunjuk teknis (juknis/juklak) yang menjadi pedoman operasional di tingkat lapangan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan berjalan tidak seragam dan hanya berdasarkan inisiatif pengelola masing-masing.

c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Meskipun beberapa kegiatan sosialisasi telah dilakukan, namun kesadaran masyarakat untuk memilah dan menyetorkan sampah masih rendah. Hal ini menjadi tantangan dalam menjalankan peran katalisator dan dinamisator.

d. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Kendala lain yang cukup signifikan adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk program pengelolaan bank sampah. Selain itu, jumlah tenaga penyuluh lingkungan yang bertugas di lapangan juga masih sangat minim.

e. Minimnya Kolaborasi dan Kemitraan

Pemerintah daerah belum memiliki mekanisme kolaboratif yang kuat dengan LSM, dunia usaha, maupun sektor pendidikan. Padahal kemitraan tersebut sangat diperlukan untuk memperluas dampak dan keberlanjutan program.

f. Tidak Konsistennya Program dan Monitoring

Salah satu hambatan lain yang ditemui adalah tidak konsistennya program pembinaan dan monitoring dari dinas terkait. Sosialisasi dan pelatihan umumnya hanya dilakukan pada awal pembentukan bank sampah. Setelah itu, tidak ada pendampingan lanjutan yang

membuat pengurus merasa berjalan sendiri.

g. Kurangnya Dukungan Kebijakan di Tingkat Lokal

Hingga saat ini, pengelolaan bank sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya didukung oleh regulasi teknis seperti Peraturan Bupati khusus tentang bank sampah. Hal ini menyebabkan kurangnya dasar hukum yang kuat dalam penganggaran, penggunaan, dan evaluasi kegiatan.

h. Lemahnya Data dan Sistem Informasi

Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam hal pendataan dan pelaporan. tidak adanya sistem informasi terpadu membuat sulit untuk memantau perkembangan dan capaian dari masing-masing bank sampah.

G.. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Tebing Tinggi sudah berjalan pada empat dimensi peran menurut Ryaas Rasyid, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Namun, keempat peran tersebut belum terlaksana secara maksimal karena terkendala oleh regulasi yang belum lengkap, sarana dan prasarana yang terbatas, serta kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat.

2.Saran

Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan membuat pedoman teknis yang lebih jelas terkait pengelolaan bank sampah. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan, pelatihan bagi masyarakat, dan penyediaan sarana pendukung seperti mesin pencacah serta

kendaraan angkut. Pemberian insentif dan penghargaan bagi masyarakat yang aktif juga dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah. (2018). Berbagai Metodologi Dalam Penelitian : Pendidikan dan Manajemen. Gunadarma Ilmu

Agusven, Tubel., Satriadi., Hafizni, Rihan., Santoso, Kristia, Nanda., Hasnarika. (2023). Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Rey Media Grafika

JURNAL

Andriani, R., & Utami, S. (2021). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 112–120.
<https://doi.org/10.25077/jap.9.2.112-120.2021>

Fauziah, B. D., & Sulistiyo, H. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam menghadapi Kekeringan di Desa Basuhan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah (Doctoral dissertation, IPDN).

Dewi, K. R., & Mahendra, I. (2021). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Bank Sampah. Jurnal Kebijakan Publik, 11(2), 45–54.

Hansen, Seng. (2020). Investigasi

Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. Jurnal Teknik Sipil. 27 (3), 283-294.

Hidayat, N., & Arifin, M. (2020). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah. Jurnal Manajemen Lingkungan, 6(1), 65–74. <https://doi.org/10.14710/jml.v6i1.27438>

Peraturan dan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1)
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
3. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah